



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian

dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



10. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 758);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017.**

Pasal I

ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 758) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017.

BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 2017,

BAB IV : Penutup.



(2) Uraian secara rinci Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 16



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gresik. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dalam hal ini Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2021

Dokumen RKPD yang memperhatikan peraturan tersebut mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja pelayanan SKPD. Dokumen RKPD Perubahan 2017 juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Gresik Tahun 2017;



- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menyusun dokumen Perubahan RKPD ini sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);



14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 758);

BAB II

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Target Tahun 2017

1. Indikator Tujuan

1. Mewujudkan keharmonisan sosial berlandaskan keluhuran Budaya Gresik didukung kondusifitas dan ketangguhan daerah daerah;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Peduli Hak Asasi Manusia	77	90	78

2. Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pelaku usaha;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik	76,90 (Baik)	Baik

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan profesionalisme birokrasi dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B
2	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi	6.15-6.65	6,58	6.30-6.85

5. Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57.5-64.8	58,30	59.5-66

6. Menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aksesibilitas kesempatan kerja didukung pengembangan ekonomi kerakyatan pemberdayaan;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,67%	5,67%	5.50-5.20%

7. Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat secara inklusif melalui penanggulangan kemiskinan secara terpadu;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Tingkat Kemiskinan	13,25-12,25%	13,63%	12.75 - 11.75%

8. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penguatan atribusi layanan pendidikan dan kesehatan;

No	Indikator Tujuan	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.75-77.35	73,57	77.05-77.95

9. Menghadirkan keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.

No	Indikator Kinerja	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.02-89.6	89,31	89.3-89.9

2. Indikator Sasaran

1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100% 872 dari 872 Konflik Sosial	100%

2. Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	56,06%	56,06%	60,60%

3. Membangun partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dengan menumbuh-kembangkan budaya olahraga dan prestasi, menguatkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme, dan menggugah kreatifitas dalam kemandirian;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Pemuda Pelopor/Berprestasi	40-50%	43,33% (145 Pemuda Berprestasi)	45-55%

4. Mewujudkan karakter bangsa yang berakhlak mulia berlandaskan keluhuran budaya serta meningkatkan inovasi dan kreasi karya seni dan budaya berbasis kearifan lokal maupun adaptif terhadap perkembangan global;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Kelestarian Budaya	100%	100% 18 Cagar Budaya yang dilestarikan	100%

5. Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat serta inovatif berbasis teknologi;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Ketunggalan Identitas Berbasis e-KTP	69,72%	77.95%	73,87%

6. Mewujudkan penyelenggaraan e-Government yang menjamin keterbukaan informasi didukung ketersediaan dan validitas data sektoral yang komprehensif serta perlindungan terhadap akses informasi;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Pertumbuhan kumulatif pengakses Website Resmi Pemda	2,5-3,5%	13,3 % 805 Informasi dlm 1 Thn	2,7-3,7%
2	Persentase Ketersediaan Data Report Based (Online)	100%	85.53%	100%

7. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	60-70%	71%	65-75%

8. Menghadirkan keselarasan pembangunan daerah melalui komprehensifitas perencanaan dan inovasi daerah.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Nilai Pangripta	B	B	B

9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan didukung pengawasan komprehensif dan konstruktif

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Tindak lanjut Audit dan Aduan Masyarakat	Tindak lanjut audit internal 100%, audit eksternal 60%, dan Aduan Masyarakat 100%	audit internal 100% audit eksternal 71.98%, Aduan Masyarakat 100%	Tindak lanjut audit internal 100%, audit eksternal 70%, dan Aduan Masyarakat 100%

10. Meningkatnya kualitas an kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Profesionalitas ASN	71%	75,8	72%

11. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akomodatif, aspiratif, dan inklusif;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	10%	30% 13 Perda	12%

12. Menghadirkan birokrasi yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase standardisasi pelayanan publik	50%	78,2%	B
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	CC	B (60.09)	80%

13. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntable melalui tata kelola keraspian berbasis teknologi informasi dan melindungi memori kolektif rakyat;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Capaian Alih Media Arsip	75%	52% (25 dari 48 OPD)	80%

14. Memajukan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	17,06% (Rp.27,45 T)	36% (31.95 T)	24,12% (Rp.31,45 T)

15. Meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan asset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;	1-13% (800-900 Milyar)	Rp.715 M	13-25% (900-1000 Milyar)

16. Meningkatnya kunjungan wisata yang didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketersediaan fasilitas publik untuk berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi dalam pengembangan ekonomi kreatif

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Apresiasi Wisata	0,16%	5,01%	0,18%

17. Mencapai kemandirian pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah didukung peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya pertanian secara berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	194 Kg/Kpt/Thn	202.21 Kg/Kpt/Thn	194 Kg/Kpt/Thn

18. Mencapai swasembada produksi pengelolaan perikanan dan keberdayaan ekonomi nelayan dengan memacu optimalisasi kapasitas dan kontinuitas inovasi;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Peresentase Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	4,2-42,4%	4.78%	4,25-42,45%

19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Kualitas Air Sungai	47.3-51.5	49.01	51.5-55.75
2	Indeks Kualitas Udara	72.25-75	68	75-79

20. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 % Jalan	83,31 %	84,81% Jalan
2	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir	25%	24,50 %	37%
3	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	15,23%	15,23 %	25,23%
4	Persentase Akses Air Bersih/Minum	65.95%	61,95%	75.95%
5	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	100%	100%

21. Memperkuat konektivitas transportasi antar wilayah Gresik dengan prioritas keselamatan, ketepatan waktu layanan, kelengkapan sarana prasarana penunjang transportasi, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Rasio Konektivitas Transportasi	0.26	0.26	0.28

22. Mewujudkan kepastian hukum didukung optimalisasi performance pelayanan pertanahan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Penyelesaian Konflik pertanahan	100%	100%	100%

23. Membangun tenaga kerja yang berdaya saing disertai peningkatan kualitas dan kapasitas produktifitas serta mewujudkan harmonisasi hubungan industrial yang selaras dengan kondusifitas iklim ketenagakerjaan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.88%	67.88%	67.90%
2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	88,54%	88,54%	89%

24. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan memacu produktivitas perdagangan dalam iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing didukung pertumbuhan industri mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	1-5% (1.317.863,55)	12,97% 170.910.371 (US \$)	5% 1.383.756,74
2	Angka Pertumbuhan Komulatif Industri Kecil Menengah (IKM)	0,71% (7086)	7086 IKM (0.71%)	1,42% (7136)

25. Memperkuat daya saing, peningkatan kinerja, dan menstimulasi pertumbuhan usaha UMKM dan Koperasi yang inovatif;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Pertumbuhan Kumulatif usaha mikro dan kecil	0,33% (189.156)	1,89% (192.091)	0,66% (189.780)
2	Angka Pertumbuhan Koperasi sehat	1,97% (310)	298	3,62% (315)

26. Menghadirkan peningkatan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata dengan mendekatkan jangkauan layanan kepada masyarakat dan keberdayaan partisipatoris serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS, eks Penyandang Penyakit Sosial, penyandang disabilitas	4,3-4,8%	5.44%	4,5-5%

27. Mendorong percepatan pengentasan lingkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Luas Penurunan kawasan permukiman kumuh	10 ha	12,15 ha	10 ha
2	Persentase Rumah Layak Huni	85,64%	85,94	85,75%

28. Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan menuju kemandirian ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang profesional, optimalisasi perekonomian desa, dan keberdayaan masyarakat yang sejahtera serta penguatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Pembangunan Desa	66,45	0,6208	70,90%

29. Menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas berlandaskan perluasan aksesibilitas, penguatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh pada aspek suprastruktur dan infrastruktur pendidikan

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase Partisipasi Pendidikan Usia Dini (PAUD);	83.00%	70.66%	84.00%
2	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98.88%	98.62%	98.96%
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat;	86.75%	86.04%	86.80%
4	Angka Rata rata lama sekolah	9.02-9.10	9.2	9.05-9.13

30. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak, status gizi, dan pengendalian penyakit secara berkelanjutan didukung pemerataan akses dan mutu pelayanan;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;	115	82,46	110
2	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup;	4.15	3.44	4.12
3	Angka Usia Harapan Hidup	71.67-71.75	72 Tahun	71.70-71.80
4	Survey Kepuasan Masyarakat layanan RSUD	75%	0.78	76%

31. Membangun Gresik Cerdas melalui inisiasi budaya gemar membaca;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Indeks Minat Baca Daerah	1 : 6,7	1 : 6,8	1 : 6,6

32. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta mewujudkan pembangunan berlandaskan kesetaraan dan keadilan Gender;

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Persentase penyelesaian penanganan aduan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62.50-63.00	62,79	62.75-63.25

33. Mengendalikan kuantitas, jumlah kelahiran, pertumbuhan, dan laju pertumbuhan penduduk didukung optimalisasi program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

No	Indikator Sasaran	2016		Target
		Target	Realisasi	2017
1	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.6-1.4	1.18	0.6-1..4
2	Persentase Prevalensi peserta KB Aktif;	87%	81,34%	88%

3. Indikator Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.2.1 Pendidikan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Jumlah lembaga kursus yang dibina	55-65%	89,11%	60-70%
2	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase PAUD yang tersertifikasi	55-65%	48,05%	60-70%
3	PROGRAM WAJIB BELAJAR				

No	Program	Indikator Program	2016		Target		
			Target	Realisasi	2017		
	PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Sederajat	98.88	98,62	98.96		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;	108.01%	103,04	108.60%		
		Angka Kelulusan (AL) SD dan Sederajat;	100%	100%	100%		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD dan Sederajat;	0.03%	0,019	0.02%		
		Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;	97.00%	98.15	97.25%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat ;	86.75%	86.04	86.80%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat;	98.90%	101.41	98.95%		
		Angka Kelulusan (AL) SMP sederajat;	100%	100%	100%		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP sederajat;	0.12%	0.09	0.11%		
		Angka keberlanjutan dari SMP dan sederajat ke SMA/SMK dan Sederajat	101.08%	106.38	101.10%		
		Jumlah Produktifitas Karya Tulis Siswa;	2	2	2		
		4	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN				
				Rasio Rombongan belajar SD dan Sederajat sesuai SPM;	71%	73.49	72%
Rasio Rombongan belajar SMP dan Sederajat sesuai SPM;	35%			82.19	36%		
Persentase Kunjungan Pengawas;	56%			90.34	57%		
Persentase Rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);	41%			46.00%	46%		

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi sertifikasi;	90%	92.55%	91%

2.1.2.2 Kesehatan;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu, dan Ponkesdes	59.38% Puskesmas yang dibangun, 60.81 Pustu yang dibangun	(19/32x100) 59.38% Puskesmas yang dibangun, (45/74x100) 60.81% Pustu yang dibangun, (36/250x100) 14.4% Ponkesdes yang dibangun	62.5% Puskesmas yang dibangun, 60.81 Pustu yang dibangun
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan	100	100	100
3	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan pelayanan nifas	91%	91,75%	92%
		Cakupan pelayanan KN lengkap	95%	94,46%	95%
		Persentase balita gizi kurang	8%	6,91%	8%
		Cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak dan remaja	70%	82,24%	72%
		Cakupan Pelayanan kesehatan lansia	N/A	68,84%	68,84%
4	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase rumah tangga ber PHBS	71	71	72
5	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA	Persentase keluarga yang ber STBM	3%	3%	6%
		Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan kerja	4%	4%	7%
		Persentase puskesmas yang melakukan kesehatan olah raga	4%	4%	7%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
		Persentase TTU yang bersanitasi dasar	45%	45%	50%
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase bayi yang mendapatkan IDL (Imunisasi Dasar lengkap)	91.5%	91.5%	92%
		Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi	80%	80%	82%
		Persentase penduduk >15 tahun yang dilakukan screening faktor resiko PTM	4%	4%	6%
		Notifikasi Kasus TB yang diobati (Case Notification Rate = CNR)	137	137	141
		Insiden / Angka kesakitan DBD	51	51	52
		Persentase kasus pemasangan yang ditangani	0.60%	0.60%	0.50%
7	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL	Persentase puskesmas terakreditasi	34%	34%	65%
		Persentase Pustu sesuai standar	40%	37.8%	47%
		Persentase Ponkesdes sesuai standar	56%	54.2%	58%
		Persentase klinik yang memiliki ijin operasional	100%	100%	100%
		Persentase RS yang memiliki ijin operasional	100%	100%	100%
		Persentase penyehat tradisional terdaftar	58%	58.9%	62%
8	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan berijin	100%	100%	100%
		Persentase kefarmasian sesuai standar	65%	68.67%	70%
		Persentase sarana pengelolaan makmin memenuhi syarat	50%	68.72%	55%
		Persentase ketersediaan obat	87%	87.18%	88%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
		dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan			
		Persentase pemenuhan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sesuai standar	22%	25.9%	28%
9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	100	100%	100%
10	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Bed Occupancy Rate (BOR)	72,03%	77.77	72,59%
		Average Length Of Stay (LOS)	4,49 hari	4.00	4,48 hari
		Turn Over Internal (TOI)	1,75 hari	1.20	1,77 hari
		Bed Turn Over (BTO)	58,42 kali	69.00	56,37 kali
		Gross Death Rate (GDR)	74%	75.32	72%
		Net Death Rate (NDR)	45%	45.34	44%
		Cost Recovery Rate (CRR)	70%	85.48	73%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	78.13	76%
		Tingkat Kemandirian Keuangan	60%	63.00	61.5%
11	Program Pembinaan Sosial Dampak Tembakau	Presentase Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok	50-80%	78.13	70-100%

2.1.2.3 Pekerjaan umum dan penataan ruang;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rasio Kemantapan Jalan dibanding Luas Wilayah	0.358	0.358	0.365

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
2	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Ketersediaan lampu PJU	58	58	62
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	83,31 % Jalan dan 95,38% Jembatan	83,31 % Jalan dan 95,38% Jembatan	84,81% Jalan dan 95,88% Jembatan
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase PJU yang Menyala	75	75	80
5	Program pengendalian banjir	Persentase Kemantapan Saluran Pengendalian Banjir Perdesaan	24.5	24.5	37.45
6	Program pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Kondisi Baik Saluran Drainase Perkotaan	64.99	64.99	66.49
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi	15.23	15.23	25.23
8	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Kapasitas tampungan air waduk	63.86	63.86	63.87
9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/minum	Persentase Akses Air Bersih	65.95	65.95	75.95
10	Program pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah strategis	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Strategis	15	15	15
11	Program pengembangan dan pembangunan gedung negara	Jumlah Gedung Negara yang Ber IMB	5	4	10
12	Program pengaturan jasa konstruksi	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang Tertib	1	100	1
		Jumlah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang diterbitkan	30	14	35

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
13	Program perencanaan tata ruang	JUMLAH RDTR yang disusun	100	1	100
14	Program pemanfaatan ruang	Persentase Implementasi Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	75	30	80
15	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Ijin Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	20	94,92	40

2.1.2.4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program lingkungan sehat permukiman	Luas Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	173.92	145,72	173.92
	Program pengembangan permukiman				
	Program pengembangan dan pengelolaan rumah umum				
	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman				
2	Program pengembangan rumah swadaya	Persentase Rumah Layak Huni	85.64	85,94	85.64
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Jumlah Rumah Tangga Pengakses Fasilitas Air Limbah Komunal	4750	4750 RT	4750

2.1.2.5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana	45-55	34/66 Desa Tangguh x 100	50-60
2	Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Kedaruratan dan Penyaluran Logistik (Terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n)	100	100%	100%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
3	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase rehabilitasi dan Rekontruksi Penanggulangan Bencana (Terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n)	100	100%	100%

2.1.2.6 Sosial

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pemberdayaan fakir miskin, komunikasi adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya	Rasio penanganan terhadap jumlah PMKS	6	5,44	5,55
2	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rasio penanganan penyandang disabilitas	0.02	1,82%	0.025
4	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Persentase Fasilitasi Panti Asuhan Anak, Legiun Veteran dan TMP	47.73	11,36%	47.73
5	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Rasio penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial	0.25	1,37%	0.25
6	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0	Inisiasi lembaga LK3 dilaksan akan mulai tahun 2017	0
7	Program pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Persentase Fasilitasi Taman Makam Pahlawan	100	100%	100%

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.2.7 Tenaga Kerja

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan kualitas tenaga kerja	Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis Demand Driven	30	30	100
		Jumlah Cakupan Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis Entrepreneurship	360 pencaker dan 200 santri	361 Pencari Kerja dan 200 Santri	360 pencaker dan 200 santri
2	Program peningkatan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.84%	67,84%	67.86%
3	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rata rata cakupan Pencari Kerja	9,20%	2000-2501	9,29%
4	Program informasi pasar kerja dan peningkatan produktifitas	Persentase Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	2000-2500	9,20%	2000-2500

2.1.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (p2t-p2a);	11.35	100% (300 pengaduan)	100%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
2	Program pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan daerah	1.06	32%	≥30%

2.1.2.9 Pangan;

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Inisiasi Data	Pemetaan Kerawanan Pangan dilaksanakan mulai tahun 2017	4 Kecamatan
		Persentase Stabilitas Harga Pangan Utama	85.50%	113,70%	86.00%
2	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	72%	81,82%	73%

2.1.2.10 Pertanahan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Fasilitasi sertifikasi asset tanah Pemerintah Daerah	N/A	100%	100%
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN	Persentase Fasilitasi Tanah yang dibebaskan	N/A	100%	100%

2.1.2.11 Lingkungan Hidup

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Uji Kualitas Lingkungan Hidup oleh Laboratorium Lingkungan Hidup	490	490	510

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
2	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Pencemaran Air	IPU 72.25-75 dan IPA 47.3-51.5	IPU 75% IPA 51.5%	15,35%
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam				
4	Program peningkatan pengendalian polusi				
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)	Ratio ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah perkotaan	15,35%	15.48%	100
6	Program pengelolaan laboratorium lingkungan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Lanoratorium Lingkungan	100	100%	490
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Peningkatan cakupan pengangkutan sampah	47	47	60

2.1.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Prosentase kepemilikan KTP-el	69.72	111.8%	73.87%
		Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	KIA dilaksan akan mulai tahun 2017	22.22%
2	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0 - 18 th.	77.01	84,83	86.92%
3	Program peningkatan pengelolaan informasi dan inovasi administrasi kependudukan	Persentase arsip Akte Kelahiran yang dialih media	20	16,79	34.34%
		Persentase Validasi Data Ganda dan Anomali	20	25,73	35%
4	Program peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83	83%	83.5%

2.1.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;	50	61,23%	50
2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Indeks Pembangunan Desa	66.45	0,6208	66.45
3	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	Ketersediaan data potensi desa	50	83,98	50
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase fasilitasi badan usaha milik desa (bumdes) dan badan usaha bersama milik desa (bumades)	50	85,59	50

2.1.2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB	11.35	19.01%	10.35
2	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 5tahun;	1.06	.86%	1.05
3	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per Desa/Kelurahan;	25	20.12	25

2.1.2.15 Perhubungan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan	Angka Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan	0.14% 100	0,128%	0.13% 100
		(Angkutan Umum) (Unit)			
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Jumlah ruas Jalan yang terlayani angkutan dibanding ruas jalan	0	100%	0

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
		Ketersediaan Angkutan Massal	0.14%	Angkutan missal mulai tahun 2017	0.13%
		Persentase Cakupan Angkutan Penyeberangan	60.75%	61,97%	66.82%
3	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Ketersediaan Rencana Induk dan Rencana Umum Perhubungan	100% (4)	9 Dokumen	100% (9)
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte Angkutan)	6	6	10
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Terminal Angkutan)	3	3	3
4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Capaian Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100%	100%
5	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten;			
		Rambu Lalin (unit)	1469	1.473 Unit	1.504
		Marka Jalan (m2)	500	1.619 m2	900
		APILL (unit)	76	83 Unit	95
		Jumlah Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) dalam Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	3	3 Lokasi	5 Lokasi

2.1.2.16 Komunikasi Dan Informatika

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pengembangan E-Government	Jumlah Ketersediaan Jaringan WAN dan Fiber Optik Pemkab.Gresik	58 SKPD 25 UPTD	100%	58 SKPD 30 UPTD
		Kecepatan Akses Internet untuk Perkantoran Pemerintahan;	150	100%	200 Mbps

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
2	Program Kerjasama Informasi	Cakupan Informasi Official Website Pemerintah Daerah yang terpublish;	745 Informasi	100%	781 Informasi

2.1.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah Kumulatif Pertumbuhan usaha mikro dan kecil	189,156	192.091 UKM	189,156 UKM
2	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Kumulatif Pertumbuhan Anggota Koperasi	139911	140.446 koperasi	139.911 koperasi

2.1.2.18 Penanaman Modal

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan iklim, promosi dan data dan informasi penanaman modal	Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi penanaman modal	3 Paket	3 Paket	3 Paket
2	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya	75	99.82	75
3	Program pelayanan perizinan usaha dan perizinan tertentu	Persentase Penyelesaian Izin Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	75	98.75	75
4	Program pelayanan perizinan tata ruang, bangunan dan lingkungan	Persentase Penyelesaian Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	75	86.43	75

2.1.2.19 Kepemudaan dan Olah Raga

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif;	26 Organisasi	27 Organisasi	26 Organisasi Kepemudaan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah peningkatan kapasitas kepemudaan;	110 Wirausahawan muda	120 Wirausahawan muda	120 Wirausahawan muda
3	Program pembinaan dan pemasyarakatan, pengembangan kebijakan dan manajemen, peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase fasilitasi terhadap cabang olahraga berprestasi	10-20% Cabor	30 Cabor	32 Cabang Olahraga

2.1.2.20 Statistic

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH	Presentase Ketersediaan Data Report Based dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

2.1.2.21 Persandian

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pembangunan Komunikasi Dan Persandian Daerah	Persentase Cakupan Pengamanan Informasi yang Dikecualikan milik Pemerintah Daerah.	100%	100%	100%

2.1.2.22 Kebudayaan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100% (18)	19 Kali	19 Kali

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
2	Program pengembangan nilai budaya dan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase fasilitasi terhadap Cagar Budaya	100% (5)	38 Buah	5 Cagar budaya yang dilestarikan

2.1.2.23 Perpustakaan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Rasio koleksi buku dan jumlah pemustaka	0.08 - 0.16	0,57	0.08 -0.16 Judul buku/Orang

2.1.2.24 Kearsipan.

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH	Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	100%	100%	100%

C. Urusan Pilihan

2.1.2.25 Kelautan dan Perikanan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan perikanan tangkap	Produktivitas perikanan budidaya (ton)	19714.47 TON	18786.01 Ton	
2	Program pengembangan budidaya perikanan	Produktivitas lahan tambak, air payau, dan air tawar (ton)			
		a. Air Payau	289	290.33 Ton	292
		b. Air Tawar	335	392.09 Ton	339
		c. Produktivitas Garam	5250	4,500 Ton	5512
3	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka Konsumsi Ikan; Konsumsi Hasil Olahan Perikanan oleh Penduduk (kg/kapita/th)	32.17	33,89 kg.kapita /tahun	32.34 kg.kapita/tahun
4	Program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (wp3k)	Persentase Kemantapan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan			
		a. Saluran tambak	46.5	46.5	48
		b. Tempat Pendaratan Ikan	25	25	30
		c. Tambatan perahu	25	25	30

2.1.2.26 Pariwisata

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	3,112,278 Orang	3.262.641 Orang	3,117,278 Orang
2	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Fasilitas terhadap Obyek dan Potensi Destinasi Wisata	5	9	5
3	Program pengembangan kemitraan	Ketersediaan Ruang Ekonomi Kreatif;	25	25	25

2.1.2.27 Pertanian

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pemberdayaan kelompok tani	Jumlah Fasilitas Keberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	208	208	228
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan	Jumlah Olahan Produk Unggulan Pertanian	30	30	45
3	Program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura	Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura	0.64	0,66	0.62
4	Program peningkatan produksi pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Pangan dan Hortikultura	661,550	660.864	664,963
5	Program peningkatan produksi perkebunan	Jumlah produksi komoditas Unggulan Perkebunan	142,280	161.056	142,283
6	Program perlindungan tanaman perkebunan	Persentase Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;	120	5,35%	153
7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan lapangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh	242	120	282
8	Program pengembangan sarana dan	Jumlah fasilitas infrastruktur pendukung	60%	242	65%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
	prasarana pertanian/ perkebunan/ peternakan	pertanian			
9	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase Penangan Penyakit Ternak;	14,707,8 89.81	79,87	14,814,335
11	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Produksi Komoditas Unggulan Peternakan	5.44	14.726.6 10	5.35
12	Program peningkatan kualitas bahan baku	Cakupan Varietas Bahan Baku nikotin Rendah	7-12	Identifikasi Varietas Bahan Baku nikotin rendah diidentifikasi tahun 2017	9-14

2.1.2.28 Kehutanan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pengelolaan Taman Hutan Raya	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya yang ditetapkan	100%	Kab. Gresik belum memiliki Tahura	

2.1.2.29 Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	Persentase Fasilitasi terhadap Pengembangan Energi Terbarukan	100%	Urusan ESDM diampu oleh Pusat dan Provinsi, Kabupaten hanya dalam pemanfaatan langsung panas bumi. Berdasarkan riset, Bagian SDALH (SKPD Lama), pemanfaatan panas bumi belum dilaksanakan pada tahun 2016	

2.1.2.30 Perdagangan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah Pengawasan alat ukur dan tata niaga perdagangan	640 timbangan & SPBU	640 timbangan & SPBU	450
2	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah Nilai Ekspor Barang/Komoditi (US \$)	1,317,863	170.910.371	44
3	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pameran antar wilayah dalam maupun luar daerah	10 Pameran	36 Pameran	5 pameran
4	Program peningkatan pasar	Jumlah Fasilitasi Pasar	7 Pasar	7 Pasar	7 pasar kabupaten

2.1.2.31 Perindustrian

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah Jumlah Kumulatif Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	240	7086 IKM	370
2	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Kumulatif Sentra IKM	7086	104 SENTRA IKM	6.987
3	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Jumlah Kumulatif IKM yang dibina	104	240 IKM	106

D. Urusan Penunjang

2.1.2.32 Sekretariat Daerah

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
2	Program penataan peraturan perundang-undangan	Produktivitas Pengesahan dan penetapan Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%
3	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis kesejahteraan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
	rakyat	Pembangunan Daerah			
4	Program fasilitasi kehumasan daerah	Persentase Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;	100%	100%	100%
5	Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Jumlah Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak Dan Elektronik	100%	100%	100%
6	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pembangunan daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
7	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis perekonomian daerah	Persentase Fasilitasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah	100%	100%	100%
8	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis SDA LH	100%	100%	100%
9	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik (Kategori sangat baik)	100%	100%	100%
10	Program peningkatan kualitas tata laksana dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB dengan nilai B ke atas);	100%	100%	100%
		Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	100%	100%	100%
11	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	100%	100%
12	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%
13	Program peningkatan	Persentase fasilitasi peningkatan	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
	disiplin aparatur	disiplin Aparatur			
14	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan, aset, dan barang daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	100%	100%	100%
15	Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan pelayanan pengadaan barang/jasa daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis pengelolaan Keuangan, Aset, dan Barang Daerah	100%	100%	100%
16	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
17	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase fasilitasi terhadap pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	100%

2.1.2.33 Sekretariat DPRD

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Produktivitas Perda Inisiatif DPRD	10 Perda	100% (12 Perda)	10 Perda
2	Program fasilitasi pelaksanaan hubungan DPRD dengan masyarakat	Persentase Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	100	100%	100%

2.1.2.34 Perencanaan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk Teknis	100	100	100
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD	70	70	75
2	Program perencanaan	Persentase Keselarasan	100	100	100

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
	pembangunan ekonomi	Perencanaan Pembangunan ekonomi			
3	Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100	100	100
4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Praswil SDA & LH	100	100	100

2.1.2.35 Penelitian dan Pengembangan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program penelitian dan pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100
2	Program pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100	100	100

2.1.2.36 Keuangan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran	Persentase Penyusunan APBD	100	100%	100
2	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100	100%	100
3	Program peningkatan pendapatan pajak daerah	Persentase Cakupan Pendapatan Pajak Daerah	65-75	46,6%	65-75
4	Program peningkatan pendapatan pbb dan bphtb	Meningkatnya Pendapatan PBB dan BPHTB	5-15%	PBB 76 M BPHTB 144 M	5-15%
5	Program peningkatan pelayanan dan intensifikasi penerimaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah	15-20%	412 M	15-20%

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset dan barang daerah	Persentase Akurasi data barang milik daerah	75	75	75

2.1.2.37 Inspektorat

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	100%	100%	100%
2	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%
3	Program penguatan pengawasan daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP SKPD	100%	100%	100%

2.1.2.38 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	64	99,98	66
		Persentase Pejabat Struktural yang telah memiliki sertifikat diklat PIM sesuai dengan jenjangnya	70	104,64	79
2	Program pembinaan dan kesejahteraan aparatur sipil Negara	Persentase jumlah ASN yang disiplin	100	99,74	100
3	Program mutasi dan kepangkatan aparatur sipil negara	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan analisa Jabatan	100	100	100

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
		Rasio Jabatan struktural yang terisi	100	92,82	100
4	Program data formasi dan pengembangan aparatur sipil Negara	Persentase tingkat validitas data aparatur sipil Negara	100	100	100
		Persentase Jumlah ASN dengan kebutuhan	67	93,18	69

2.1.2.39 Kecamatan

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa.	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan Karang Taruna)	78%	78%	81%
2	Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	76%	76%	81%
3	Program koordinasi pengelolaan keuangan, aset dan perekonomian desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa	75%	75%	80%
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	75%	75%	80%
5	Program koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan	75%	75%	80%

2.1.2.40 Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Indikator Program	2016		Target
			Target	Realisasi	2017
1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun 2017. Evaluasi meliputi realisasi indikator kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD.

Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan tema “Pembangunan yang berkeadilan, berdaya saing dan berakhlak mulia dengan memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik” dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Rencana rincian Pendapatan dan penganggaran belanja perubahan tahun 2017 disajikan pada **Lampiran BAB III RKPD.**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2017 merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor meliputi perkembangan makro ekonomi di tingkat global maupun daerah, konstelasi sosial politik, perubahan kebijakan nasional, aspirasi bottom up bottom up yang dilandasi keraifan lokal, serta menghadirkan pemerintah daerah yang lebih optimal dalam mengimplentasikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan mencapai prioritas-prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2017 secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Sedangkan secara substansial dalam penyusunan RKPD ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, serta memperhatikan dinamika lingkungan penyelenggaraan pemerintahan maupun perkembangan kerangka ekonomi daerah beserta pelbagai faktor yang mempengaruhinya.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Gresik Tahun 2017 disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.